

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, lahirlah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perjanjian, lalu dari sini menimbulkan adanya perikatan bagi dua orang yang telah membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber dari perikatan adalah perjanjian selain sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu telah setuju untuk melakukan sesuatu. Dikatakan bahwa dua perkataan tersebut diartikan sama. Kata-kata kontrak, secara lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang itu adalah yang paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat sumber lain yang dapat melahirkan perikatan. Sumber ini seperti

¹² Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, Hlm. 6.

undang-undang. Maka, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada yang terlahir dari “undang-undang”¹³

Subekti mengatakan bahwa suatu hubungan hukum kekayaan dari dua atau beberapa pihak yang terlibat, bahwa pihak yang satu berhak atas sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang akhir ini mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu bagi pihak yang utama. Pihak yang mempunyai hak untuk dikatakan sebagai kreditur dan juga pihak yang berkewajiban sebagai debitur. Perbuatan debitur disini bernama prestasi.¹⁴

Pengertian dari perikatan diatas dapat arti bahwa pihak yang satu harus aktif atau hak dan pihak yang lain mempunyai sifat pasif yaitu kewajiban, hal ini untuk melakukan suatu prestasi. Salah satu unsur-nya adalah dengan adanya prestasi (Pasal 1234 KUHPerdara) yaitu:

1. Memberikan
2. Berbuat Suatu
3. Tidak berbuat sesuatu.¹⁵

Dari perjanjian ini terdapat sebuah hubungan hukum bagi pihak yang telah berkaitan. Peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya hak atas prestasi serta kewajiban untuk berprestasi. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa, perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana orang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

¹³ Sarjanaku, *Pengertian Perjanjian Secara Umum*, <http://www.sarjanaku.com>, akses 1 April 2018.

¹⁴ Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Op.cit, hlm. 4.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada pihak yang berjanji atau yang dianggap melakukan janji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu dikatakan sebagai perjanjian. Perjanjian ini adalah salah satu hubungan yang mengenai adanya harta benda kekayaan antara kedua belah pihak.¹⁶

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila ada kata kesepakatan. Dan perjanjian ini mempunyai nilai apabila sudah mendapatkan sepakat dengan apa yang menjadi hal pokok dan tidak adanya sesuatu formalitas.¹⁷ Untuk terjemahan mengenai kata perjanjian dalam bahasa belanda adalah *overenskomst*. Diartikan juga sebagai persetujuan dimana seseorang saling mengikatkan diri kepada yang lain yang bertujuan sebagai pelaksanaan dari suatu hal dalam bidang harta kekayaan.¹⁸

Yang mengatur mengenai perjanjian ini biasanya disebut dengan hukum perjanjian (*law of contract*). Perumusan ini berkaitan dengan adanya konsesus dimana terdapat dalam lapangan harta kekayaan. Pengertian disini memiliki beberapa unsur yang diatur sebagaimana disebutkan berikut:

1. Ada pihak-pihak, paling sedikit dua orang
2. Terdapat persetujuan dengan pihak yang terkait
3. Adanya tujuan yang diinginkan untuk dapat dicapai

¹⁶ Prodjodikoro Wirdjono, 2004, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, Hlm. 7.

¹⁷ Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Op.cit, Hlm. 15.

¹⁸ Kusumahadi, 2001, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Hlm. 77.

4. Terdapat sebuah prestasi yang dilangsungkan.¹⁹

Pasal 1320 KUHPdata membahas mengenai adanya suatu syarat sah untuk dilakukannya sebuah perjanjian. Perjanjian dapat dianggap sah jika ia telah memenuhi semua syarat yang telah disebutkan dalam pasal ini, yaitu:

1. Adanya kesepakatan
2. Kecakapan Hukum
3. Terdapat objek
4. Causa yang halal

Syarat diatas dibedakan lagi menjadi syarat subyektif dan juga syarat obyektif. Yang termasuk kedalam syarat subyektif adalah syarat 1 dan juga 2 perjanjian ini berhubungan dengan terdapatnya subjek yang ada pada perjanjian tersebut, dan apabila salah satu diantara dari syarat ini tidak dapat terpenuhi maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, atau dapat dimintakan batal. Mengenai adanya syarat obyektif berhubungan dengan adanya syarat 3 dan 4, didalam ini berhubungan dengan terdapatnya suatu benda yang mana menjadi sebuah obyek dari apa yang diperjanjikan, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka timbulah akibat hukum terhadap perjanjian ini. Perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum dan teranggap tidak pernah ada perjanjian sebelumnya.

¹⁹ Ibid, Hlm. 79.

b. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas penting yang ada pada hukum perjanjian, diantara lainnya adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara telah mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya.”

Yang mempunyai kebebasan untuk para pihak dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan apapun dalam isi perjanjian atau pengadaan dan persyaratannya, menentukan bentuk dari perjanjian tersebut lisan atau tertulis merupakan salah satu pengertian dari asas kebebasan berkontrak.

Untuk mengatur para pihak untuk mengadakan perjanjian merupakan salah satu sifat dari asas kebebasan berkontrak, tetapi dalam praktiknya untuk membuat suatu perjanjian dapat mengesampingkannya, kecuali dengan pasal-pasal tertentu yang mempunyai sifat memaksa pada buku III BW.²⁰

2. Asas konsensualisme

Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara mempunyai pengertian terhadap asas konsensualisme yang dapat disimpulkan. Pada salah satu syarat sah perjanjian mengadakan adanya kesepakatan antara kedua belah

²⁰ Legal Akses, *Asas-Asas Perjanjian*, <http://legalakses.com>, akses 01 April 2018.

pihak, sehingga dari kesepakatan ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi siapapun yang membuat kontrak. Kontrak tersebut mempunyai sifat obligatoir yang mempunyai pengertian bahwa ia dapat melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk terpenuhinya kontrak tersebut.²¹

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas kepastian hukum mempunyai nama lain yang biasanya disebut dengan asas *pacta sunt servanda* yang mempunyai hubungan dengan adanya perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah sebagai asas yang menyatakan seorang hakim atau seseorang yang berkedudukan sebagai orang ketiga tunduk kepada substansi kontrak yang telah terbuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Para pihak ini tidak dapat melakukan sebuah intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata merupakan suatu dasar untuk mengatur mengenai asas *pacta sunt servanda* ini. Pasal ini menjelaskan bahwa “perjanjian yang terbuat secara sah dikatakan berlaku sebagai undang-undang.”²²

4. Asas itikad baik (*geode trouw*)

Terdapat pasal yang menegaskan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan adanya asas itikad baik” pasal yang mengatur ini adalah Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini mengatur

²¹ Ibid.

²² Ibid.

mengenai bahwa para pihak yang membuat perjanjian mempunyai kewajiban untuk melakukan substansi kontrak dengan adanya kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik yang datang dari para pihak.

Asas ini mempunyai dua macam bentuk, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi mempunyai pengertian bahwa seseorang memberi perhatian sikap dan tingkah laku yang terasa nyata dari subjek, sedangkan dengan itikad mutlak sebuah penilaiannya berdasarkan pada akal sehat dan juga keadilan, adanya ukuran objektif yang dibuat untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) dengan adanya norma norma yang objektif.²³

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Macam-macam perjanjian dibedakan dengan adanya berbagai cara. Pada ilmu pengetahuan hukum perdata, perjanjian mempunyai beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Timbal Balik

Sebuah perjanjian yang dapat mengakibatkan adanya kewajiban pokok untuk kedua belah pihak merupakan pengertian dari perjanjian timbal balik. Contoh dari perjanjian ini adalah:

- a. Perjanjian jual beli (*koop en verkoop*), pengertian dari perjanjian ini adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua belah pihak. Pada salah satu pihak melakukan janji kepada pihak lain

²³ Negara Hukum, *Asas-Asas Perjanjian*, <http://www.negarahukum.com>, akses 01 April 2018.

untuk menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar sebagaimana harga yang telah disepakati. Syarat untuk jual beli adalah, yang pertama dengan adanya antara mata uang dengan barang. Kedua, barang yang dijual merupakan barang milik sendiri dan yang ketiga adalah jual beli bukan dilakukan dengan suami-istri yang masih dalam ikatan perkawinan.²⁴

- b. Perjanjian tukar menukar (Ruil, KUHPerdata pada Pasal 1541 dan seterusnya), pada satu pihak yang memberikan suatu barang dan untuk pihak yang lain mempunyai dan akan menyerahkan suatu barang begitu juga dengan adanya pihak lain merupakan pengertian dari perjanjian ini.²⁵
- c. Perjanjian sewa menyewa (*huur en verhuur*, KUHPerdata pada Pasal 1548 dan seterusnya), yang mempunyai pengertian bahwa pihak atau seorang pihak dapat menyewakan dan memberi izin dengan jangka waktu tertentu kepada pihak yang lain untuk menggunakan barangnya dengan pihak lain membayar sejumlah uang sewa sebagaimana yang telah ditentukan.²⁶

2. Perjanjian Bernama (benoemd) dan Perjanjian Tidak Bernama (onbenoemde overeenkomst)

Pengertian dari perjanjian ini adalah bahwa setiap perjanjian bernama ini mempunyai kekhususan karena ia mempunyai nama

²⁴ Jurnal Hukum, *Jenis-Jenis Perjanjian*, <http://www.jurnalhukum.com>, akses 01 April 2018.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

sendiri. maknanya adalah bawa perjanjian tersebut telah terdapat ketentuannya dan telah ada namanya oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan dengan tipe yang pada praktiknya sudah banyak terjadi sehari-hari. Seperti contohnya adalah: jual beli, sewa menyewa dan juga lainnya. Perjanjian bernama mempunyai jumlah yang terbatas dan diatur dalam Bab 5 sampai dengan Bab 18 KUHPerdara.

Untuk perjanjian yang tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan juga untuk jumlahnya tidak terbatas, nama disesuaikan dengan adanya kebutuhan pihak-pihak yang melakukannya. Yang dilapangkannya perjanjian ini seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengeolaan dan juga lainnya. Perjanjian ini tidak terdapat pengaturannya dalam KUHPerdara, tetapi ia lahir dalam masyarakat berdasarkan dengan adanya asas kebebasan berkontran dengan mengadakan perjanjian atau partij otonomi.²⁷

d. Pengaturan Perjanjian Pinjam Nama atau Nominee

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Nama

Pada praktiknya sebuah perjanjian ini didasarkan dengan adanya penggunaan nama seseorang Warga Negara Indonesia sebagai suatu pemegang saham atau sebagai pemilik dari sebidang tanah hak milik atau dengan status hak tanah sebagai hak guna bangunan. Praktik

²⁷ Ibid.

perjanjian pinjam nama ini sangatlah banyak terjadi didalam kota kota besar dan yang paling sering terjadi adalah di kota Bali.²⁸

Perjanjian pinjam ini dimasukan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian inominat karena tidak ada pengaturan yang mengatur secara khusus dan tidak secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdara. Dengan dilihat hanya berdasarkan pemenuhan prestasi yang para pihak terlibat dalam perjanjian sebenarnya perjanjian ini dapat termasuk kedalam perjanjian atas beban. Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian pinjam nama ini walaupun sebenarnya masih tidak secara tegas diatur tetapi perjanjian ini biasanya digunakan untuk membeli property atau melakukan investasi di Indonesia. *Nominee* yang bertindak untuk para pihak lain berlaku sebagai wakil dalam arti yang mempunyai batasan. Terkadang istilah tersebut digunakan untuk menandakan sebagai agen atau wali.²⁹

Perjanjian ini bukan hanya digunakan oleh Warga Negara Asing untuk melaksanakan investasi di Indonesia. Tetapi juga digunakan untuk pasangan perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan yang sebenarnya disini mereka menikah tetapi tidak membuat sebuah perjanjian perkawinan agar memiliki suatu property di Indonesia. Sehingga perjanjian ini biasanya digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan penyelundupan hukum.

²⁸ Tampu Bolon, *Nominee Arrangement*, <http://tampubolon.wordpress.com>, akses 01 April 2018.

²⁹ Brayan A. Gamer, *Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation*, Hlm. 1072.

2. Perjanjian Pinjam Nama dalam Peraturan Perundang Undangan

Indonesia

Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatakan bahwa:

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas mempunyai larangan atau dilarang untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa untuk kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Pada pasal diatas sudah secara jelas mengatakan bahwa

perjanjian pinjam nama ini telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dan lebih lanjut didasarkan dalam Pasal 33 ayat (2) yang telah menyebutkan bahwa “Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”³⁰

Hal yang disebutkan juga dipertegas dengan adanya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang berbunyi “Saham perseroan yang dikeluarkan harus atas nama pemiliknya” dengan kata lain, tidak akan diperbolehkan suatu saham perseroan dikeluarkan dengan nama “wakil” dari si pemilik saham, tetapi atas nama si pemiliknya langsung. Selain mengenai saham disini ditegaskan juga pada Pasal 21 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Hanya warga Negara Indonesia yang dapat memiliki Hak Milik di Indonesia”

³⁰ Ibid.

B. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Didalam praktiknya pada sesungguhnya hukum terus berurusan dengan adanya asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena semua asas ini termasuk sebagai salah satu konsep bagi tujuan dari hukum dan penegakan hukum. Sehingga hakim untuk memutuskan suatu perkara diharuskan untuk didasarkan dengan ketiga asas ini. Disini kita akan membahas mengenai apa saja ketiga asas ini.

a. Teori Asas Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dipikirkan orang dan dikenal oleh orang. Terdapat keseimbangan yang seharusnya untuk pihak-pihak peroleh baik itu dalam bentuk keuntungan maupun bentuk kerugian merupakan konsep dari keadilan. Pada benarnya sangat susah untuk menilai tolak ukur dari keadilan hukum karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan adil untuk pihak yang lainnya.

Disini penulis menggunakan teori dari L.J Apeldoorn dimana ia telah mengatakan bahawa “keadilan tidak dapat disamaartikan dengan adanya persamarataan, keadilan tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama”³¹ Makna yang dimaksudkan disini mengenai bahwa keadilan itu didalam macam-macam perkara haruslah dipertimbangan sesuai dengan bentuk perkaranya. Intinya menurut seseorang adalah adil bagi dia tetapi belum tentulah adil bagi pihak lain.

³¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

“Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama...jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti dari *summon ius; summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi”³²

Selanjutnya Ahmaed Ali MD menegaskan sebenarnya keadilan itu bagi sebuah putusan hukum yang sudah hakim jatuhkan terhadap adanya pencari keadilan haruslah didasarkan dengan adanya kebenaran substantive, memberika sesuatu kepada orang yang mempunyai hak untuk menerimanya.³³

Lebih lanjut Hans Kelsen juga telah menjelaskan mengenai hukum yang bisa memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Sehingga, dalam peraturan perundang-undangan adalah gambaran dari apa itu keadilan yang telah dituangkan. Menurut Fence M keadilan dapat diukur dengan dikatakan yang pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu yang sebenarnya kepada tempatnya dan memberikan kepada orang yang mempunyai dan berhak mempunyai bagiannya, yang mendasarkan pada suatu asas yang

³² Ibid, hlm. 11-13.

³³ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Miembar Hoekoem dan Keadilan*, Yogyakarta, Edisi 1, 2012, hlm. 132.

pada dasarnya mengatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).

Penulis disini tertarik dengan adanya pendapat yang dikeluarkan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pada hakikatnya keadilan itu adalah untuk memberikan hak kepada tempatnya dan pada orang yang berhak diberikan yang menjadi haknya, yang pada dasarnya menggunakan asas bahwa semua orang mempunyai kedudukan sama didepan hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan dengan adanya keadilan itu sendiri. Pernyataan ini sama dengan argument yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa keadilan merupakan suatu penilaian dari seseorang kepada orang yang lain yang pada sebenarnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.³⁴

b. Teori Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu harapan untuk orang yang mencari keadilan dikarenakan adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Syafruddin Kalo pernah mengatakan bahwa:³⁵

“Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian,

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 77.

³⁵ Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*”, <http://www.academia.edu.com>, akses 28 Maret 2019, hlm. 5.

misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.”

Dengan perkembangan masyarakat ini jika dilihat mengenai kepastian hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan ini mempunyai akibat bahwa akan tertinggal karena ada beberapa hal didalam beberapa bidang yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati juga mengatakan yaitu;

“Asas kepastian hukum jika dilihat dari makna sederhananya adalah caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait dengan cepat ialah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Sedangkan biaya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa didepan pengadilan. Dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya yang lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.”³⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan untuk hukum yang sebenarnya adalah telah

³⁶ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia.”, hlm. 3.

dilaksanakan, bahwa semua yang mempunyai hak menurut hukum dapat memperoleh apa yang berhak dipunyainya serta putusan juga dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keadilan tetapi pada faktanya hukum tidak mempunyai kesamaan dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mempunyai ikatan dengan setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan mempunyai sifat yang subyektif atau individualitis dan juga tidak adanya persamarataan.³⁷

Pada intinya hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan putusan disini harus sebagai hasil dari yang telah didasarkan dengan adanya fakta-fakta yang ada pada persidangan dengan cara yang relevan dan juga yuridis serta adanya pertimbangan yang berasal dari hati nurani. Sehingga hakim juga dituntut untuk sekiranya bisa menafsirkan makna yang terdapat pada undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

c. Teori Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum ini sebenarnya dapat muncul apabila telah terpenuhinya pelaksanaan dari penegakan hukum. Sehingga penegakan atau pelaksanaan hukum ini dalamnya telah memberi manfaat dan kegunaan bagi para pihak dan juga bagi masyarakat. Karena hukum disini telah diakui apabila hukum ini dapat menciptakan manfaat yang ditelan oleh masyarakat. Kemanfaatan disini digambarkan dengan adanya kemanfaatan yang ditimbulkan karena adanya putusan yang dikeluarkan

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Op.Cit, hlm. 160.

oleh hakim. Sehingga dalam persidangan hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan hasil akhir untuk mengatakan bahwa putusan ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi para pihak.

Jeremy Bentham pernah mengatakan yang pendapatnya ini dikutip oleh Mohammad Aunurrohim yang isinya adalah hukum barulah mempunyai nilai pengakuan sebagai hukum ketika ia telah memberikan manfaat dengan skala besar terhadap sebanyak-banyaknya orang.³⁸

C. Pengaturan Tentang Pembuktian

a. Pengertian Hukum Pembuktian

A. Rasyid Roihan telah mengutip mengenai pengertian pembuktian dari R. Subekti yang menyatakan bahwa “pembuktian sebagai salah satu yang dapat hakim yakini dengan keberadaan kebenaran terhadap suatu dalil atau dalil-dalil yang ada pada waktu persidangan terkemukakan dengan adanya persengketaan” sehingga dari pengertian ini dapat diintikan bahwa pembuktian hanya dijadikan dan dapat dibuktikan pada waktu adanya suatu perselisihan sehingga pada saat pengadilan hal-hal yang oleh pihak lawan tidak dibantah maka pembuktian tidak mempunyai keperluan.

Pada perkara yang sangatlah kompleks didalam proses litigasi mempunyai peranan mengenai hukum pembuktian (*law of evidence*). Keadaan komplek ini dapat terjadi sangatlah rumit disebabkan pembuktian selalu terdapat hubungan dengan kemampuan berekonstruksi kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu (*past event*) sebagai salah satu

³⁸ Muhammad Aunurrohim, “Keadilan dan Kemanfaatan Hukum.”, Hlm. 7.

kebenaran (*truth*). Dalam proses persidangan ini dirasa sulit dalam mendapatkan suatu kebenaran. Kesulitan dalam pencarian ini dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu:

- a. Pertama, terdapat faktor yang berkaitan dengan sistem adversarial.

Pada sistem ini pihak mempunyai hak yang sama pada saat perkara ini diadakan yang bertujuan agar dapat menunjukkan dan mengasihikan kebenaran dari masing-masing, dan juga pihak disini mendapatkan hak agar dapat membantah kebenaran yang pihak lawan katakana yang sudah sesuai dengan proses adversarial.³⁹

- b. Kedua, pada hakikatnya dalam proses pembuktian kedudukan hakim dengan sistem adversarial begitu lemat dan tidak aktif atau biasa disebut dengan pasif. Disini hakim dalam menemukan kebenaran sangatlah tidak aktif berlainan dengan apa yang diajukan dan dikatakan oleh para pihak ddalam persidangan. Hakim pada peradilan perkara perdata tidak mempunyai hak untuk melangkah kearah sistem inkuisitorial. Hakim perdata mempunyai halangan dengan terdapatnya berbagai tembok batasan. Seperti contohnya adalah seorang hakim tidak mempunyai hak secara bebas untuk dapat memilih sesuatu dan jika hakim telah dihadapkan dengan alat bukti yang tidak cacat atau sempurna dan juga mempunyai kekuatan mengikat seperti akta otentik, pengakuan atau sumpah. Berlainan dengan itu, walaupun

³⁹ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-16, 2016, hlm. 496.

kebenarannya masih bisa diragukan tetapi hakim tidak mempunyai kebebasan untuk bisa menilainya.⁴⁰

- c. Ketiga, ketika waktu mencari dan menemukan kebenaran menjadikan semakin lemah dan sulit disebabkan adanya fakta dan bukti yang telah pihak diajukan dan tidak dianalisis dan menilai oleh para ahli (*not analyzed and appraised by experts*).⁴¹

b. Beban Pembuktian

Pada ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Perdata yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam sistem hukum pembuktian yaitu terdapat beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*). Pada Pasal 163 *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), Pasal 283 *Recht Reglement Buitengewesten* (R.Bg), dan juga Pasal 1865 *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang terkenal adanya asas pembuktian yang bunyi pasal-pasalanya menjadi semakna, yaitu:

“Barangsiapa terdapat suatu hak atau guna untuk membantak hak orang lain atau menunjuk pada terjadinya suatu peristiwa maka ia mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.”

Dari pasal sebelumnya terdapat kesimpulan bahwa beban pembuktian ini dapat terjadi pada para pihak yang adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perkara baik penggugat maupun tergugat. Dalil-dalil gugatannya yang diajukan pada penggugat sedangkan tergugat

⁴⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm. 9.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Ibid, hlm. 497.

mempunyai suatu kewajiban untuk dapat mengasihkan bukti untuk bantahannya.

Berkaitan dengan adanya beban pembuktian, maka agar tidak adanya praktik pembebanan yang menjadikan adanya kerugian bagi salah satu pihak maka seharusnya ada prinsip-prinsip untuk beban pembuktian, sebagai berikut:⁴²

a. Tidak bersikap berat sebelah

Untuk seorang hakim pada hal ini bisa memikulkan pembebanan pembuktian sehingga harus bersikap adil dan juga berdasarkan dengan prinsip *fair trial* lalu diharapkan tidak berat sebelah atau bersikap parsial tetapi adil dan imparisialitas. Maknanya adalah hakim tidak boleh menjadikan salah satu pihak mendapatkan kerugian, tetapi dengan cara bijaksana dibagikannya sesuai dengan sistem hukum pembuktian yaitu dengan cara memberikan perhitungan yang seimbang dengan pihak yang sedang berperkara.⁴³

b. Menegakan risiko alokasi pembebanan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, semua pembebanan pembuktian wajib dilakkan dengan *fair* dan imparisial dan setuju dengan mekanisme alokasi yang diatur dalam sistem hukum pembuktian. Dalam mekanisme alokasi ini terdapat lekatan

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Ibid, Hlm. 218.

⁴³ Ibid.

mengenai risiko yang harus menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pihak.⁴⁴

Maknanya disini yaitu apabila pihak yang mempunyai beban pembuktian maka dia wajib mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu dan jika yang berkaitan tidak mampu untuk memberikan pembuktian maka pihak itu bisa mendapatkan risiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan dalam diberikannya bukti yang relevan atas hal tersebut.⁴⁵

c. Jenis-Jenis Alat Bukti

Pada pengaturan perundang-undangan hukum acara perdata memiliki berbagai macam alat bukti yang telah disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur pada Pasal 163 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdata, adalah:

1. Alat Bukti Surat

Dalam ketentuan hukum acara perdata terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa:

“Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUHPerdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.”

Dalam praktiknya surat yang menjadi alat bukti tertulis dijadikan menjadi akta dan surat bukan akta. Akta ini dikategorikan lagi menjadi tiga bagian yaitu dengan adanya akta otentik, akta dibawah

⁴⁴ Ibid, hlm. 519.

⁴⁵ Ibid.

tangan dan juga surat bukan akta yang lebih sering didengar dengan alat bukti surat secara sepihak. Dari sini dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang bisa dibuat dan ditandatangani oleh notaries dan juga pejabat resmi lainnya seperti camat yang dapat menjadi pejabat pembuat akta tanah demi kepentingan para pihak yang ada pada kontrak.

Sebagaimana penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sungguhlah sempurna dan juga mengikat, tidak diperlukan adanya bukti tambahan apabila sudah terdapat akta otentik ini. Hakim juga wajib memercayai kebenaran yang ada didalam akta tersebut selama tidak dibuktikan dengan sebaliknya. Apabila dibuktikan sebaliknya maka pihak yang harus menggunakan bukti harus membuktikan dengan bukti yang kekuatannya sama dengan akta. Karena jika ada salah satu pihak yang membantah akta otentik maka ia berkewajiban untuk membantah dan harus mengajukan bukti bahwa tidak ada kebenarannya. Sebagaimana telah dicantumkan pada Pasal 1865 KUHPdata, Pasal 163 HIR dan juga Pasal 283 R.Bg sehingga bukti yang telah diajukan sebelumnya dijadikan bukti yang menjadi permulaan dan membutuhkan adanya bukti tambahan.

Mengenai akta dibawah tangan sudah jelas bahwa akta ini tidak diatur dan tidak ada pengaturannya dalam HIR. Dimana sebenarnya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ini sama dengan akta

otentik. Akta dibawah tangan harus mencantumkan tanda tangan yang diakui oleh pihak lawan, jika isi dan tanda tangan yang ada pada akta bawah tangan ini disangkal dengan pihak lawan maka akta ini dianggap mempunyai nilai kekuatan yang sama dengan bukti permulaan.

2. Alat Bukti Saksi

Pasal 169-172 HIR an Pasal 306-309 RBg mengatur mengenai saksi, pembuktian saksi ini dapat diperbolehkan dalam hal apa saja terkecuali jika undang-undang mengatakan dan menentukan lain. Pembuktian dengan saksi ini kadang diperlukan jika tidak terdapat bukti surat maupun tulisan yang biasanya kurang lengkap sehingga mengakibatkan tidak dapat mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang diajukan pada persidangan bagi para pihak.

3. Persangkaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur adanya pengertian mengenai persangkaan yang pada khususnya ada dalam Pasal 1915 KUHPdata yang menyatakan persangkaan merupakan kesimpulan yang pada undang-undang maupun oleh hakim diambil dari suatu peristiwa yang dikenal mengarah pada suatu peristiwa yang tidak dikenal.

Contohnya adalah apabila hakim diperbolehkan untuk menganggap anak yang dilahirkan didalam perkawinan menjadikan suami yang ada dalam keluarga itu mendapatkan status bapak.

4. Pengakuan

Pada Pasal 1923 KUHPerdata dan juga Pasal 174 HIR mengatur mengenai pengakuan yaitu:

“(i) Pernyataan atau keterangan yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam memeriksa suatu perkara; (ii) Pernyataan atau keterangan tersebut diucapkan di muka hakim atau dalam persidangan; atau (iii) Keterangan itu bersifat pengakuan (confession) bahwa apa yang dilakukan pihak lawan benar untuk sebagian atau seluruhnya”

Kesimpulannya disini adalah jika salah satu pihak telah mengakui adanya fakta tertentu maka hakim tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan suatu pendapat dan opini mengenai masalah atau objek pengakuan. Pengakuan dapat dilaksanakan dengan lisan maupun secara tertulis. Namun pengakuan yang pihak sampaikan langsung didepan hakim dianggap bahwa sangatlah kuat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pengakuan yang oleh kuasa hukumnya diwakili tidak diperbolehkan, semua pengakuan dianggap kuat dan benar selama itu diakui dipersidangan perkara.

5. Sumpah

Sumpah disini menjadi alat bukti persidangan pada perkara perdata.